

**GLOBALISASI DAN PEMETAAN KEKUATAN STRATEGIS
PERTAHANAN MARITIM INDONESIA
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TRANSNASIONAL:
Berdasarkan Analisis Model *Element of National Power*: (Political,
Military, Economic, Social, Infrastructure, and Information/PMESII)**

**GLOBALISATION AND THE MAPPING OF STRATEGIC POWER OF
INDONESIA'S MARITIME DEFENCE TO CONFRONT TRANSNATIONAL
THREAT : *Based on Analysis of Element of National Power Model*:
(Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, and
Information/PMESII)**

Muhammad AS Hikam dan Yosua Praditya¹

Dewan Analis Strategis (DAS)
(mashikam@gmail.com)
(yosua.praditya@gmail.com)

Abstrak - Arus globalisasi saat ini jelas memberikan ruang gerak yang semakin bebas bagi ancaman untuk masuk dan mengganggu keamanan nasional. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar tidak boleh menutup mata terhadap ancaman yang sudah didepan mata yang dapat masuk melalui jalur-jalur perairan strategisnya. Peningkatan kapasitas kekuatan pertahanan maritim menjadi kunci bagi pemerintah untuk terus mengawal langkah Indonesia kedepan dalam menghadapi rangkaian perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala regional maupun global. Proyeksi pembangunan kekuatan maritim perlu diberikan prioritas utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia yang dipandang negara-negara internasional. Pada akhirnya, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang strategis dalam pergaulan internasional apabila mampu membangun kekuatan maritimnya.

Kata Kunci: pertahanan, globalisasi, ancaman transnasional, *element of national power*

Abstract - Globalization causes more spaces for threats to infiltrate and interfere the national security. Indonesia as the biggest archipelago should not disregard to all threats that may enter by its strategic sea-lane. The development of maritime defence is a key factor for the government to keep and guard Indonesia in facing, both globally and regionally, the changing environment. The development of maritime should be put on the prime list so it will make Indonesia not only become a great state, but also as the global maritime axis. Finally, Indonesia will gain a better bargaining power in international relations if only supported optimally by its defence maritime.

Keywords: defence, globalization, transnational threat, and *element of national power*

¹ Dr. Muhammad AS Hikam, M.A adalah Ketua Dewan Analis Strategis (DAS) periode 2013-Agustus 2015, Lektor Kepala Prodi Hubungan Internasional President University, pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan pengajar Sesko TNI & Sesko AD, AL, dan AU tahun 2015. Yosua Praditya, S.E., M.Si (Han) adalah staf sekretariat DAS dan merupakan alumnus Universitas Pertahanan Jurusan Manajemen Pertahanan Cohort IV.

Pendahuluan

Era globalisasi membuat negara terus mengevaluasi kemampuan pertahanannya dalam menghadapi ancaman yang bentuk dan polanya sudah berubah. Ancaman sudah tidak lagi berbentuk agresi militer dari suatu negara sebagai aktornya. Namun ancaman saat ini sudah berevolusi dan berubah bentuk menjadi yang tidak terbayangkan sebelumnya dan melibatkan aktor-aktor lain di luar negara.² Masuknya kelompok-kelompok radikal, semakin mudahnya peredaran narkoba masuk ke wilayah Indonesia, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, dan perdagangan manusia adalah fakta yang masih terjadi di negeri ini. Ancaman transnasional sangat mudah untuk masuk dari perairan laut Indonesia yang pengawasannya lebih membutuhkan biaya dan tenaga operasional yang jauh lebih besar dibandingkan pengawasan wilayah darat.

Tidak optimalnya kekuatan pertahanan maritim Indonesia menjadi salah satu penyebab mengapa begitu banyak kasus-kasus *transnational crimes* dapat terjadi di perairan laut Indonesia. Kekayaan dan sumber daya laut Indonesia diperkirakan hilang sekitar 3 milyar dolar AS per tahunnya sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin. Diperkirakan ada sekitar 3.000 kapal beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia, penyelundupan pasir sebesar 2-2,5 milyar dolar AS per tahun, dan penyelundupan minyak sebesar 5 milyar dolar AS per tahun.³ Semuanya terjadi karena lemahnya pengawasan negara terhadap keamanan laut nasional.

Oleh karena itu, di era kepemimpinan sekarang, Presiden Jokowi memiliki visi yang jelas terkait dengan pembangunan poros maritim. Terdapat lima pilar poros maritim Presiden Jokowi, yaitu (1) Membangun kembali budaya maritim; (2) Menjaga dan mengelola sumber daya laut; (3) Mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim; (4) Membangun diplomasi maritim; dan (5) Memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan maritim.⁴ Oleh karena itu, pembangunan maritim perlu diikuti visi politik presiden yang perlu diterjemahkan dan diformulasikan melalui kebijakan

² Donny Adian, "Ancaman Baru, Perang Non-Konvensional", *Jurnal Pertahanan*, Vol.1, No.1, (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2011), hlm. 13.

³ Hikam, AS (Ed.), *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*, (Jakarta: BIN, Rumah Buku, 2014), hlm. 339.

⁴ Lihat 5 andalan poros maritim Jokowi.

pertahanan negara.⁵ Visi maritim nasional merupakan bagian dari strategi membangun pertahanan Indonesia pada saat ini dan dimasa mendatang.

Pemerintah perlu melihat secara jelibagaimana kondisi pertahanan maritim nasional yang sebenarnya saat ini, sehingga dapat dengan tepat menjawab pertanyaan apakah visi maritim Presiden Jokowi benar-benar dapat implementasikan atau tidak. Dalam tulisan ini akan dikaji pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dinamika ancaman, khususnya di sektor maritim, dan menganalisis proyeksi pertahanan maritim Indonesia kedepan berdasarkan model *element of national power: PMESII (Political, Military, Economy, Social, Infrastructural, and Informational)*. Selanjutnya tulisan ini dibuat untuk kepentingan pertahanan nasional yang praktiknya akan selalu melibatkan akademisi dan praktisi dalam menjaga kedaulatan maritim NKRI.

Pertahanan Negara Untuk Kedaulatan Maritim

Berdasarkan UU Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002, ditegaskan bahwa pertahanan negara (hanneg) adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan segenap keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁶ Kedaulatan negara turut mencakup wilayah laut Indonesia yang luasnya sekitar 3.257.483 km² (belum termasuk perairan ZEE), serta terdapat jalur strategis ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I, II, dan III yang membagi tiga wilayah kepulauan Indonesia. Kondisi geografis inilah yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang strategis, dan bahkan dianggap sebagai pintu gerbang kawasan Asia-Pasifik.

Posisi strategis laut Indonesia membuat pemerintah harus tetap membuka mata bahwa ancaman akan selalu datang dengan sifat dan bentuknya yang lebih beragam. Sektor laut nasional harus dijaga dan perlu mendapat prioritas utama dalam strategi hanneg saat ini. Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan regional

⁵ "Tantangan Panglima TNI Baru", dikutip dari surat kabar *Kompas*, 12 Juni 2015.

⁶ Lihat definisi pertahanan negara pada UU No.3 Tahun 2002, Bab 1 pasal 1 ayat 1 (satu).

yang menonjol karena merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global yang mempengaruhi kehidupan banyak negara.⁷

Baru-baru ini Panglima TNI Jendral Moeldoko, dalam pidatonya menyatakan pentingnya mengangkat aspek “poros maritim” untuk menjaga keutuhan NKRI. Kekuatan pertahanan maritim memang telah diselaraskan dengan salah satu visi maritim Presiden Jokowi, yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim.⁸Ribuan kapal, baik kapal dagang dan militer yang melintas di perairan Indonesia melalui SLOC (*Sea Lines of Communication*) serta SLOT (*Sea Lines of Oil Trade*) menunjukkan wilayah laut Indonesia memiliki peran yang strategis dalam tatanan global.

Kejahatan transnasional di laut harus dilawan dengan kegiatan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). OMSP sendiri telah dijabarkan dalam UU TNI No. 34 Tahun 2004 untuk menghadapi ancaman berupa aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional, dan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung sesuai dengan Sishanta.⁹Selain itu, meningkatnya intensitas ancaman keamanan transnasional seperti aksi perompakan, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, imigran gelap, penjualan narkoba, dan pencurian ikan juga menjadi perhatian pembangunan kapasitas pertahanan maritim nasional.

Secara konseptual, pembangunan pertahanan maritim negara dapat dibangun dengan mengacu pada kerangka pertahanan, yakni *ends*, *means*, dan *ways*, dimana *ends* untuk mewujudkan pertahanan maritim yang tangguh, sedangkan *means* membentuk *sea power* yang kuat, dan *ways* melaksanakan *sea control* dan *power projection ashore*.¹⁰Untuk mewujudkan hal ini juga diperlukan koordinasi yang kuat antara instansi yang terlibat yaitu TNI AL, Polri, dan Bakorkamla atau saat ini Bakamla yang khusus dihadapkan pada ancaman dan tindakan *transnational crime* di laut. Masing-masing instansi tersebut tentunya perlu ditanamkan persepsi “doktrin pertahanan maritim” yang sama, yaitu

⁷ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2008), hlm 16.

⁸ Pidato Panglima TNI Jendral Moeldoko, dalam Seminar Nasional Maritim 2015, “Strategi Geopolitik dan Pembangunan Kepulauan dalam Rangka Pembangunan Poros Maritim Nasional”, Jakarta, 15 Juni 2015.

⁹ Lihat UU No. 34 Tahun 2004, pasal 7 (tujuh), tugas pokok TNI dalam hal OMSP.

¹⁰ Salim, *Konsep Doktrin Maritim dan Strategi Maritim Nasional*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Maritim Sesko AL, 2014), hlm. 4.

menggarisbawahi peran secara bersama-sama dan menyeluruh untuk mensinergikan kekuatan maritim. Doktrin pertahanan maritim melihat beberapa aspek seperti sejarah dan lingkungan maritim, kebijakan strategis pertahanan, konsep operasional maritim, luas wilayah operasi, instrumen kekuatan tempur, dan penyelenggaraan kampanye militer yang profesional.

Globalisasi dan Dinamika Ancaman Maritim Indonesia

Terdapat tiga karakter umum globalisasi dalam konteks keamanan internasional, yakni: (1) *New forms of interconnectedness*; (2) *The behavior of new and old power*; dan (3) *New security relations among players*.¹¹ Globalisasi akan memberikan bentuk hubungan baru antar negara di suatu wilayah karena faktor politik, ekonomi, dan keamanan, selain itu globalisasi akan mempengaruhi perubahan perilaku negara sebagai aktornya. Kebijakan pertahanan dan luar negeri pasti akan berubah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena faktor globalisasi. Dalam hal ini globalisasi akan menuntut tiap negara untuk meningkatkan keamanan wilayahnya, baik dalam skala nasional, regional, dan global.

Dampak globalisasi sangat mempengaruhi arus kegiatan perdagangan dunia di perairan Asia Tenggara, khususnya selat Malaka yang merupakan pintu gerbang masuknya kapal-kapal pengangkut minyak dunia dari Timur Tengah ke kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Tidak kurang 70.000 kapal tiap tahunnya melewati jalur ini, pertumbuhan aktivitas maritim meningkat sebesar 74%, termasuk kenaikan 80% distribusi impor migas dari wilayah Timur Tengah ke Asia Timur.¹² Praktis jalur ini menjadi pintu masuknya berbagai kejahatan maritim yang pada akhirnya berpotensi besar masuk ke wilayah laut Indonesia. Berdasarkan *Maritim Domain Awareness (MDA)*,¹³ yang dikategorikan sebagai objek ancaman maritim adalah:¹⁴

¹¹ Emrys Chew, Geoffrey Till, dan Joshua Ho, (Eds.), *Globalization and Defence in Asia-Pacific*, (US: Routledge, 2009), hlm 15-34.

¹² Ganjar Santosa, *Pembentukan Rezim Maritim untuk Mengatasi Ancaman Terorisme di Maritim di Selat Malaka*, Tugas akhir modul *Security in the Asia-Pacific*, Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2013, (diambil dari tugas akhir mahasiswa MP cohort 4).

¹³ MDA adalah upaya pemahaman terhadap kejadian-kejadian di laut dan di kawasan pantai terkait isu keamanan, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan IMO (*International Maritime Organization*)

¹⁴ Ganjar Santosa, *op.cit.*

- a) Area Kepentingan Maritim: jalur laut dan wilayah kelautan.
- b) Alat Transportasi: kapal, *cargo*, beserta awak kapal, dan penumpang.
- c) Infrastruktur Maritim: pelabuhan, jalur air, fasilitas-fasilitas terminal pelabuhan, dan dermaga.

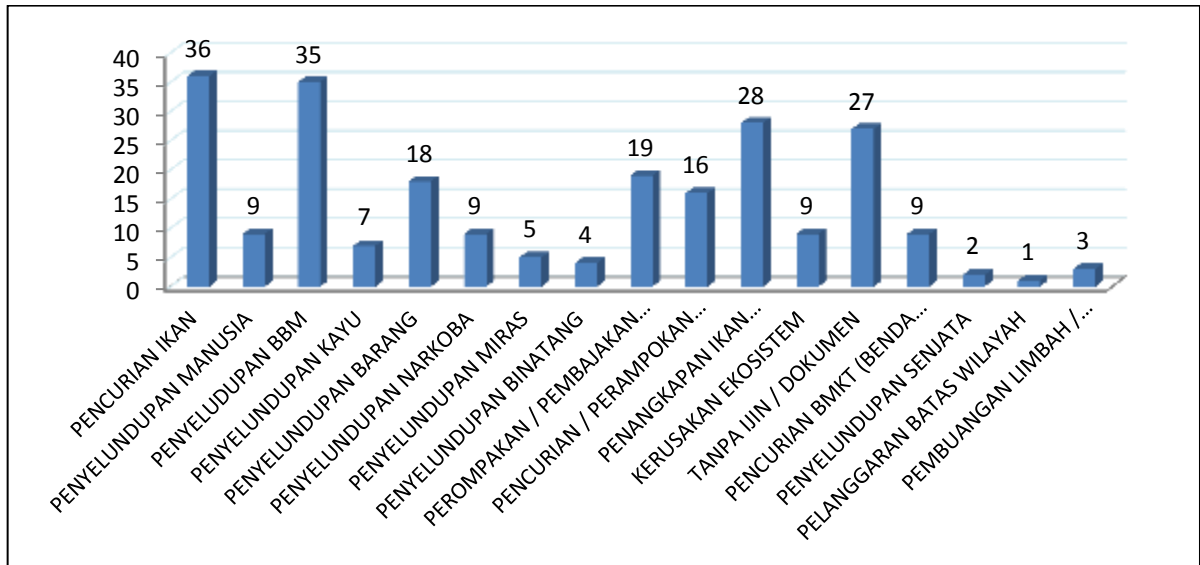
Mengacu pada kategori MDA di atas, maka disimpulkan berapa banyak objek-objek maritim nasional yang berpotensi dirugikan oleh kejahatan-kejahatan transnasional. Indonesia dengan luas wilayah laut yang mencapai 93.000 km² dengan luas ZEE (Zona Eksklusif Ekonomi) 6.159.032 km² tentunya tidak lepas dari rangkaian kejahatan transnasional seperti kegiatan perompakan, penyelundupan minyak, senjata, narkoba, dan manusia. Faktanya, juru bicara BNN (Badan Narkotika Nasional), Sumirat Dwiyanto, mengatakan jalur laut di Indonesia sudah terbilang rawan sebagai lokasi penyelundupan narkoba. Sekitar 80% penyelundupan narkoba dilakukan melalui pelabuhan laut dan perairan bebas, yakni Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan perairan lepas Laut Jawa.¹⁵ Jalur laut merupakan objek kejahatan kriminal laut karena wilayah cakupannya yang teramat luas yang sulit dijaga secara optimal oleh aparat.

Menurut mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, isu terorisme maritim menjad isu utama yang mempengaruhi hubungan antar negara. Sebagai negara yang memiliki “empat” dari “tujuh” *chokepoint* internasional, perairan Indonesia sangat rawan akan serangan terorisme maritim karena setiap hari ratusan kapal berbagai jenis dan dari berbagai negara melintasinya. Apabila terjadi serangan terorisme maritim di perairan Indonesia, sudah tidak diragukan lagi bahwa negara-negara yang berkepentingan dengan perairan Indonesia akan turun tangan langsung ke lapangan. Dampaknya sungguh tak terbayangkan, baik secara politik, ekonomi, hukum maupun militer.¹⁶ Dinamika ancaman maritim telah bergeser dari yang bersifat agresi militer menjadi ancaman nirmiliter dan lintas negara. Hal ini dapat dilihat dari data rekapitulasi keamanan periode 1 Januari–Desember 2014, pada tabel:

¹⁵ “BNN: Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Narkoba”, <http://www.voaindonesia.com/content/bnn-perairan-indonesia-rawan-penyelundupan-narkoba/1863557.html>, 4 Maret 2014, diunduh pada 7 Juli 2015.

¹⁶ “KASAL Tetap Bertekad Tenggelamkan Kapal, Komandan Seskoal: Lima Isu Keamanan Maritim Indonesia”, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>, Juni 2015, diunduh pada 7 Juli 2015.

Tabel 1. Rekapitulasi Keamanan Maritim Indonesia 2014



Sumber: Bakamla, 2014

Mengacu pada jumlah ancaman di atas, maka sudah seharusnya diperlukan beberapa langkah strategis untuk membangun kekuatan pertahanan maritim nasional yang optimal. Setidaknya negara sudah harus memproyeksikan kekuatan pertahanan maritimnya sebagai faktor pendukung visi poros maritim dunia yang sudah dikumandangkan oleh Presiden Jokowi. Pembangunan kekuatan maritim memang sudah menjadi isu utama bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan rangkaian ancaman, baik dalam skala regional dan global.

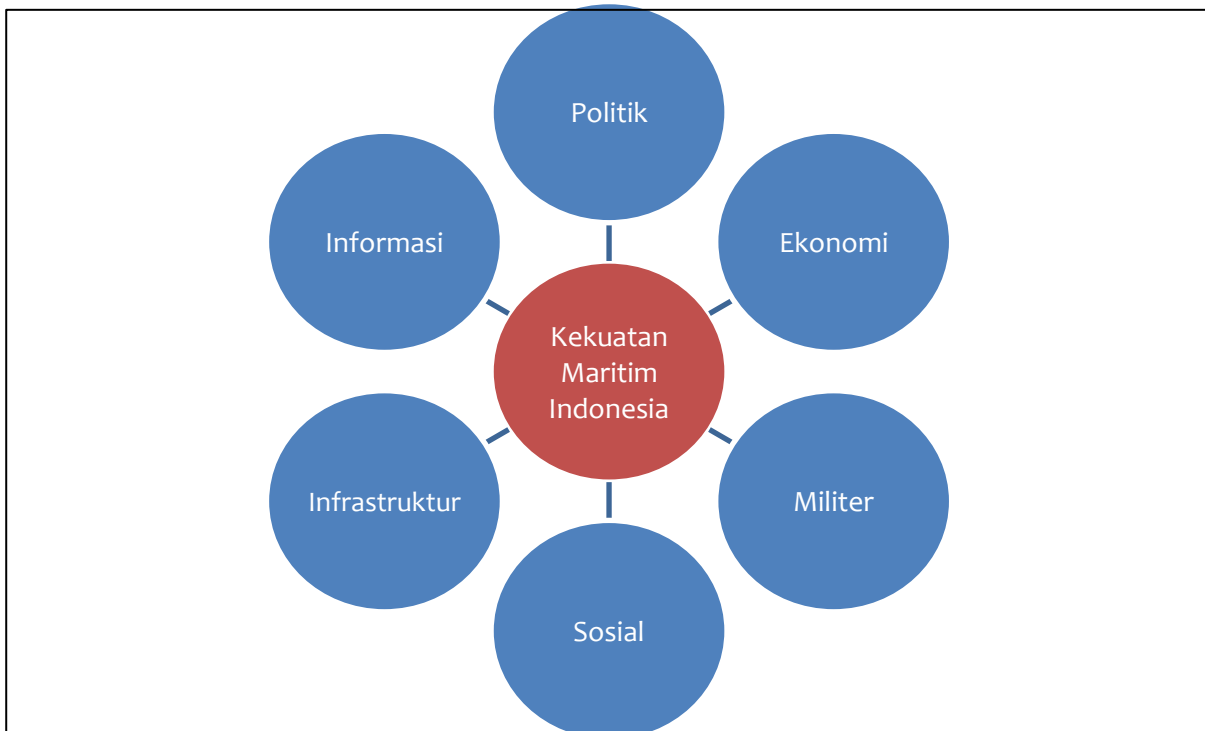
Proyeksi Pembangunan Pertahanan Maritim Berdasarkan Model *Political, Military, Economy, Social, Infrastructure, and Informational* (PMESII)

Kekuatan sebuah negara dapat diukur dari seberapa kuat faktor politik, ekonomi, militer, teritori sumber daya, sosial, dan yang lainnya. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan negara karena pada akhirnya akan digunakan untuk meraih tujuannya, atau setidaknya dapat mempengaruhi pihak yang dituju. Ketika faktor-faktor ini dikuasai maka negara dengan mudah dapat menjalankan konsep *hard power* dan *soft power*.¹⁷ Faktor-faktor ini dapat dimodelkan menjadi PMESII (*Political, Military, Economy, Social, Infrastructure, &*

¹⁷ Richard L. Armitage dan Joseph S. Nye, Jr, *CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America*, Volume I: Part II-the elements of power, (Washington, DC: Center for Strategic & International Studies, 2007),

Informational) yang dianggap sebagai elemen kekuatan negara (*element of national power*). Hubungan *element of national power* yang dihubungkan dengan strategi *hard power* dan *soft power* dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 1. Model *Element of National Power* Dikaitkan Dengan Sektor Maritim Nasional



Sumber: Gambar diolah penulis

National power negara Indonesia di era kepemimpinan Jokowi saat ini direpresentasikan dengan rencana strategis pembangunan poros maritim. Visi poros maritim telah disampaikan langsung oleh Presiden yaitu “sebagai negara dengan 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat ditentukan oleh pengelolaan samudra.”¹⁸ Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan negara saat ini berada di sektor maritim yang memiliki banyak keterkaitan di bidang militer, ekonomi/perdagangan, politik, infrastruktur, dan lain-lain.

¹⁸ Pernyataan Presiden Jokowi pada KTT EAS, Myanmar, 13 November 2014, diakses di pada berita elektronik, “Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim”, dalam <http://dunia.tempo.co/read/news/2014/11/13/118621707/cara-jokowi-jadikan-indonesia-poros-maritim>, diunduh pada 8 Juli 2015.

Dinamika Politik yang Mempengaruhi Kekuatan Maritim Nasional (Elemen Politik)

Dinamika politik internasional dan nasional memiliki pengaruh yang krusial terhadap pembangunan kekuatan maritim. Saat ini masih ada beberapa masalah politik yang menyebabkan tidak optimalnya pemerintah dalam membangun sektor kelautan, yaitu:

1. Regulasi yang tumpang tindih

Banyak regulasi yang tumpang tindih rawan terjadi gesekan antar instansi, masyarakat, dan pelaku kelautan. Misalnya TNI dan Polri sama-sama dibekali UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 45 Tentang Perikanan, dan UU no. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Selain itu, tupoksi Polri dan Kementerian KKP sama-sama dibekali UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA, UU No. Tahun 1992 Tentang Karantina, dan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pesisir &PP, dan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2. Batas maritim yang belum selesai disepakati

Masih ada beberapa batas maritim negara tetangga masih belum selesai disepakati. Salah satu contohnya adalah evaluasi *common guidelines* antara Indonesia-Malaysia yang masih belum mencapai kesepakatan.

3. Legislasi yang tidak menyeluruh

Masih ada kecenderungan pembuatan legislasi yang sektoral dan kelembagaan yang menguntungkan satu pihak/lembaga saja. Contohnya, Bakamla sebagai aktor di laut belum dibekali UU, namun hanya Perpres No. 178 Tahun 2014.

Dengan masih adanya permasalahan politik di atas, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah (1) Melakukan pelatihan kemaritiman yang diikuti semua *stakeholder*/instansi setiap bulan; (2) Melaksanakan FGD antar instansi guna menghindari tupoksi dan peraturan yang tumpang tindih; (3) Mempercepat penyelesaian kesepakatan batas-batas laut dengan negara tetangga; (4) Membuat draft UU khusus untuk Bakamla guna menghindari tumpang tindih dengan TNI AL dan Polri; dan (5) Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lama agar lebih mampu beradaptasi.

Pembangunan Kekuatan Militer Kemaritiman (Elemen Militer)

Alutsista merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus diperhatikan demi menjaga keamanan maritim nasional. Meskipun berstatus negara kepulauan terbesar, namun sampai saat ini kondisi Alutsista di sektor laut Indonesia masih kalah cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Australia. Saat ini Indonesia hanya memiliki 6 frigat, 2 kapal selam, 26 korvet, dan 21 *coastal defense craft*,¹⁹ yang jelas sangat tidak mumpuni untuk menjaga lautan seluas 3.257.483 km² (belum termasuk perairan ZEE).

Perencanaan akuisisi yang tepat dan akurat menjadi jawaban bagi Pemerintah, untuk menambah dan meremajakan alutsistanya. Perencanaan akuisisi yang terpadu, terencana, dan mandiri menjadi kebijakan strategis TNI AL dan Bakamla untuk meningkatkan kapasitas tempurnya. Saat ini Presiden Jokowi telah menargetkan pengadaan 3 unit kapal selam jenis DSME-209 dari Korea Selatan, sehingga jumlah kapal selam di 2020 menjadi lima. Selain kapal Selam, ada juga rencana Indonesia akan mendatangkan pesawat amfibi jenis BE-200 dari Rusia sebagai bagian dari perkuatan sektor maritim.²⁰

Selanjutnya, peran industri pertahanan, khususnya PT. PAL (Penataran Angkatan Laut) perlu diperhatikan mengingat visi utamanya adalah untuk membangun industri maritim nasional. Salah satu buktinya adalah PT. PAL berhasil memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 M untuk TNI AL, tahun lalu.²¹ Meskipun produktivitas PT. PAL masih terbatas, namun pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan kebijakan ToT (*Transfer of Technology*) dari beberapa negara maju yang telah berhasil mengembangkan Alutsista maritimnya. Kebijakan ToT merupakan salah satu strategi dalam mengatasi ketertinggalan Alutsista maritim yang dimiliki Indonesia.

¹⁹ Lihat http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia, diunduh pada 7 Juli 2015.

²⁰ "Alutsista TNI Terbaru di Era Pemerintahan Jokowi 2015-2020", diakses di portal <http://alutsista.net>, 1 Februari 2015, diunduh pada 7 Juli 2015.

²¹ "TNI AL Dapat Tambahan Kapal Perang Buatan dalam Negeri", <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/532745-tni-al-dapat-tambahan-kapal-perang-buatan-dalam-negeri>, 27 Agustus 2014, diunduh pada 8 Juli 2015.

Pada akhirnya, pendekatan militer harus disesuaikan dengan kebijakan MEF (*Minimum Essential Forces*) 2010-2024, yang bertujuan mendukung postur tubuh TNI yang ideal. Pada sektor kemaritiman, pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI AL baik dalam jangka pendek maupun panjang harus benar-benar diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan melalui tahapan stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasinya, dan penyiapan alutsistanya di masa mendatang, khususnya di sektor kelautan.

Pengembangan Ekonomi Melalui Industri Pertahanan Maritim (Elemen Ekonomi)

Salah satu instrumen pendekatan ekonomi dapat dilakukan dengan cara membangun industri pertahanan (indhan) maritim yang kuat, yang dalam hal ini salah satu industri garda terdepan adalah industri pertahanan di sektor laut, yakni PT. PAL. Kemandirian industri merupakan langkah tepat karena pada akhirnya akan melibatkan peran BUMN dan BUMS sebagai mitra strategis untuk mendukung tahapan kemandirian industri pertahanan di sektor laut. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan adalah (1) Mampu mengendalikan ancaman; (2) Jaminan kedaulatan; (3) Kemandirian Industri Pertahanan; (4) Peningkatan Industri Pertahanan; dan (5) Ketangguhan daya saing bangsa.²²

Terbentuknya kemandirian indhan maritim tentunya tidak akan memenuhi kebutuhan alutsista, namun juga dapat menerobos pasar ekspor untuk bersaing secara internasional, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kemandirian Indhan maritim akan memberikan efek *multiplier*, khususnya pada penyerapan tenaga kerja lokal secara masif yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan maritim negara. Tentunya kemandirian Indhan akan selalu membutuhkan pembinaan melalui kebijakan ekonomi yang tepat dan implementatif.

Pembangunan Infrastruktur Kemaritiman yang Berkelanjutan (Elemen Infrastruktur)

Infrastruktur fisik harus dibangun secara merata dari wilayah barat sampai timur, atau setidaknya harus memenuhi kebutuhan kapal-kapal, baik militer ataupun non-militer yang berlayar di sepanjang ALKI I sampai III. Pembangunan infrastruktur militer jelas akan

²² Silmy Karim, *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

mendukung interkoneksi sektor laut sehingga memperlancar setiap arus barang, jasa, maupun manusia. Tentunya sektor distribusi barang-jasa dan manusia memiliki peran penting bagi kebutuhan pertahanan maritim nasional.

Konektivitas kawasan akan menjadi lebih aman ketika sektor laut Indonesia dibekali sarana fisik yang mencukupi dan memadai. Konektivitas akan mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional karena secara cepat atau lambat akan berdampak pada cepatnya akses informasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama, dan koordinasi antar instansi di sektor laut juga akan semakin baik ketika dibekali oleh infrastruktur fisik yang memadai.

Salah satu contoh sarana fisik adalah pelabuhan, dimana sampai dengan saat ini jumlah pelabuhan Indonesia adalah 111 pelabuhan komersial, 643 pelabuhan non-komersial, 1.134 terminal khusus, dan 712 terminal untuk kepentingan sendiri.²³Banyaknya pelabuhan tentu tidak akan lepas dari potensi ancaman transnasional yang dapat masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut. Stasiun yang dimiliki salah satu aktor keamanan laut (Bakamla) masih sangat kurang sebanding, yaitu hanya 14 stasiun.²⁴Padahal tujuan stasiun tersebut disamping untuk memantau ALKI, juga untuk memantau pintu masuk perairan nasional yang sangat luas. Tiap stasiun sudah dilengkapi dengan berbagai sarana seperti: *Air base Station* dan *Radar Coastal Surveillance*, dimana sarana ini diharapkan dapat memantau seluruh aktivitas yang berada dalam jangkauannya.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah menambah jumlah stasiun menjadi 20 – 25 stasiun agar pengawasan seluruh aktivitas di sepanjang alur laut nasional dapat menjadi optimal. Dengan demikian salah satu dari konsep tol laut Presiden Jokowi, yakni pelayaran yang aman/selamat dapat terpenuhi.²⁵ Kesemuanya ini pada akhirnya akan memberikan keefisienan aktivitas laut dan juga akan memudahkan para aktor/aparat keamanan laut dalam menjalankan tugasnya menjaga perairan laut nasional dari tiap ancaman, khususnya ancaman lintas negara. Pembangunan sarana fisik maritim yang

²³ Data diperoleh dari Kemenhub.

²⁴ Data diperoleh dari Bakamla.

²⁵ Ada tiga konsep Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi, yaitu angkutan transportasi laut yang (1) handal/tidak ada hambatan; (2) tertib/sesuai peraturan; dan (3) aman/selamat.

terencana dan berkelanjutan, khususnya untuk pelabuhan dan penambahan stasiun Bakamla, adalah salah satu opsi strategis dalam mengamankan sektor kemaritiman.

Memerhatikan Kondisi Sosial Masyarakat Pesisir (Elemen Sosial)

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan, yaitu jumlahnya sekitar 1,4 juta penduduk. Maknanya, ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan.²⁶

Provinsi dengan jumlah nelayan paling banyak di Indonesia ialah Provinsi Jawa Timur (mencapai lebih dari 334.000 nelayan), diikuti Jawa Tengah (lebih dari 203.000 nelayan) dan Jawa Barat (sekitar 183.000 nelayan). Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak ke-4, ke-5, dan ke-6 di Indonesia.²⁷ Berdasarkan data tersebut maka masih banyak rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor laut.

Ketergantungan terhadap sektor laut akan sangat bahaya apabila pemerintah tidak memaksimalkan tingkat keamanan di wilayah pesisir. Sangatlah besar potensi ancaman transnasional, khususnya penyelundupan barang-barang ilegal (senjata, narkoba) di wilayah pesisir. Belum lagi penduduk nelayan yang 60%²⁸ masih dianggap miskin dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sangat rawan untuk disusupi kegiatan-kegiatan radikal dari kelompok teror. Tingkat kemiskinan dan pendidikan masyarakat wilayah pesisir yang tidak sebaik masyarakat kota tentunya tidak menutup kemungkinan akan menjadi target kelompok teroris untuk mengembangkan kelompoknya di sana.

Pemerintah perlu memerhatikan kondisi faktor sosial masyarakat pesisir, terutama di wilayah perbatasan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan

²⁶ "Nelayan Kita", <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>, 19 November 2014, diunduh pada 9 Juli 2015.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ "60% keluarga nelayan hidup miskin, PR berat buat Jokowi," <http://finance.detik.com/read/2014/07/23/120356/2645731/4/60-keluarga-nelayan-di-ri-hidup-miskin-pr-berat-buat-jokowi>, 23 Juli 2014, diunduh pada 10 Juli 2015.

ekonomi dan sosial untuk membangun pembangunan SDM untuk menangkal setiap potensi ancaman transnasional. Pembangunan SDM dipercaya sebagai salah satu upaya dan strategi untuk menangkal ancaman masuknya ideologi-ideologi radikal dari luar batas wilayah Indonesia. Koordinasi antara pejabat daerah beserta tokoh masyarakat dan adat menjadi kunci utama dalam membangun kapasitas pertahanan SDM di wilayah pesisir.

Investasi sosial, khususnya pendidikan, sangat dibutuhkan karena dipercaya sebagai jalur keluar dari lubang kemiskinan. Dengan semakin jauhnya masyarakat pesisir dari tingkat kemiskinan maka mereka pun menjadi tidak rentan terhadap objek ancaman lintas negara. Masyarakat pesisir dengan tingkat pendidikan yang tinggi merupakan perisai negara terdepan terhadap berbagai ancaman, karena cepat atau lambat mereka akan membangun wilayah pesisir menjadi daerah dengan pembangunan berkelanjutan, yang tentunya hal ini akan semakin memperkokoh sektor kemaritiman nasional.

Meningkatkan Akses Informasi Laut (Elemen Informasi)

Kemajuan di bidang teknologi informasi telah merubah wajah dunia dan menggeser pemahaman terhadap kekuatan (*power*) suatu negara sekaligus menunjukkan adanya difusi dalam pengertian tersebut. Kekuatan suatu negara tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar kekuatan militer atau ekonomi yang dimiliki, tetapi juga tergantung dari penguasaan teknologi informasi. Pada akhirnya informasi dapat diartikan sebagai berikut “ *information is a weapon and also as a target*”.²⁹

Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi telah berdampak pada perubahan hubungan antarbangsa, baik pada masa damai maupun pada masa perang. Namun, tidak dapat dihindari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi informasi digunakan pula untuk tujuan-tujuan yang destruktif, baik oleh perorangan, kelompok, maupun aktor-aktor lintas negara. Kegiatan destruktif tersebut tentu bisa saja dilakukan dimana-mana, termasuk di laut Indonesia. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mencanangkan implementasi *E-Government* pada setiap instansi pemerintah, khususnya instansi yang tugasnya terkait dengan keamanan maritim.

²⁹ Budi Soepandji, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketahanan Nasional", dalam <http://budisusiloepandji.com/2012/08/05/pengelolaan-dan-pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam-perspektif-ketahanan-nasional/>, 5 Agustus 2012.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.men

Dengan adanya *E-government* maka aparat keamanan laut akan memiliki beberapa keuntungan seperti: (1) Pelayanan jasa yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini tingkat keamanan aktivitas masyarakat di laut lebih ditingkatkan; (2) Peningkatan hubungan kapasitas antar lembaga, dalam hal ini Bakamla, TNI AL, Polri, KKP, Kemhub, dan Bea-Cukai akan semakin solid; (3) Pemberdayaan masyarakat pesisir laut yang lebih efisien karena memiliki akses informasi yang lebih mudah dan cepat; (4) Pelaksanaan kerja instansi pemerintah yang lebih cepat dan efisien, khususnya dalam menangani segala bentuk kejahatan maritim; dan (5) Terdapatnya akses informasi yang komprehensif, khususnya informasi kondisi laut dari ALKI I sampai III.

Pada akhirnya akses informasi menjadi kebutuhan yang krusial bagi pemerintah untuk menjaga wilayah maritimnya, terutama di beberapa wilayah yang aksesnya cukup sulit. Kecepatan akses informasi akan memberikan gambaran faktual akan kondisi keamanan laut Indonesia yang cakupannya sangat luas yang rentan terhadap kejahatan transnasional yang merugikan keamanan nasional. Akses informasi sektor laut perlu dibangun dan dikembangkan secara dini yang melibatkan beberapa instansi dan lembaga yang terkait dengan keamanan maritim

Kesimpulan

Kekuatan nasional di masa pemerintahan Presiden Jokowi akan ditentukan oleh kondisi kemaritiman Indonesia. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim Indonesia tampaknya akan sangat membantu Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat sebagai akibat dari faktor globalisasi. Selain itu, dinamika ancaman yang selalu berkembang dapat dihadapi melalui pembangunan kekuatan maritim.

Pada akhirnya pembangunan kekuatan maritim mencakup banyak faktor, termasuk didalamnya adalah politik, ekonomi, militer, sosial, informasi, dan infrastruktur. Dimana semua faktor-faktor tersebut adalah elemen nasional bangsa yang berfungsi

untuk mengawal kehidupan negara Indonesia saat ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memerhatikan, bahkan memprioritaskan faktor-faktor tersebut untuk kepentingan pembangunan maritim untuk menuju kedaulatan negara Indonesia di mata dunia.

Daftar Pustaka

Buku

- Emrys Chew, Geoffrey Till, dan Joshua Ho, (Eds). 2009. *Globalization and Defence in Asia-Pacific*. US: Routledge.
- Hikam, AS (Ed). 2014. *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*. Jakarta: BIN & Rumah Buku.
- Karim, Silmy. 2014. *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kementerian Pertahanan. 2008. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Jurnal

- Adian, Donny. 2011. "Ancaman Baru, Perang Non-Konvensional". *Jurnal Pertahanan*. Universitas Pertahanan. Vol 1. No. 1.
- Armitage, Richard L. dan Joseph S. Nye, Jr. 2007. *CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America*. Washington, DC: Center for Strategic & International Studies. Volume I: Part II-the elements of power.

Surat Kabar

- "Tantangan Panglima TNI Baru", *Kompas*, 12 Juni 2015.

Lain-lain

- UU No. 34 Tahun 2004, pasal 7 (tujuh), tugas pokok TNI dalam hal OMSP.
- UU No.3 Tahun 2002 Bab 1 pasal 1 ayat 1 (satu).
- Pidato Panglima TNI Jendral Moeldoko, dalam Seminar Nasional Maritim 2015, "Strategi Geopolitik dan Pembangunan Kepulauan dalam Rangka Pembangunan Poros Maritim Nasional", Jakarta, 15 Juni 2015.
- Santosa, Ganjar. 2013. *Pembentukan Rezim Maritim untuk Mengatasi Ancaman Terorisme di Maritim di Selat Malaka*. Tugas Akhir modul Security in the Asia-Pacific, Manajemen Pertahanan Cohort 4 Universitas Pertahanan.

Websites

- “Alutsista TNI Terbaru di Era Pemerintahan Jokowi 2015-2020“, diakses di portal <http://alutsista.net>, 1 Februari 2015, diunduh pada 7 Juli 2015.
- “BNN: Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Narkoba“, <http://www.voaindonesia.com/content/bnn-perairan-indonesia-rawan-penyelundupan-narkoba/1863557.html>, 4 Maret 2014, diunduh pada 7 Juli 2015.
- “Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim“, dalam <http://dunia.tempo.co/read/news/2014/11/13/118621707/cara-jokowi-jadikan-indonesia-poros-maritim>, diunduh pada 7 Juli 2015.
- “KASAL Tetap Bertekad Tenggelamkan Kapal, Komandan Seskoal: Lima Isu Keamanan Maritim Indonesia“, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>, Juni 2015, diunduh pada 8 Juli 2015.
- “Nelayan Kita“, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>, 19 November 2014, diunduh pada 9 Juli 2015.
- Salim. 2014. "Konsep Doktrin Maritim dan Strategi Maritim Nasional". *Jurnal Maritim*. Jakarta: Pusat Pengkajian Maritim Sesko AL, dalam <http://jurnalmaritim.com/2015/02/konsep-doktrin-maritim-dan-strategi-militer-maritim-indonesia/>, diunduh pada 7 Juli 2015.
- Soepandji, Budi, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketahanan Nasional", dalam <http://budisusilosoepandji.com/2012/08/05/pengelolaan-dan-pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam-perspektif-ketahanan-nasional/>, 5 Agustus 2012.
- “TNI AL Dapat Tambahan Kapal Perang Buatan dalam Negeri“, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/532745-tni-al-dapat-tambahan-kapal-perang-buatan-dalam-negeri>, 27 Agustus 2014, diunduh pada 8 Juli 2015.
- “60% keluarga nelayan hidup miskin, PR berat buat Jokowi,“ <http://finance.detik.com/read/2014/07/23/120356/2645731/4/60-keluarga-nelayan-di-ri-hidup-miskin-pr-berat-buat-jokowi>, 23 Juli 2014, diunduh pada 10 Juli 2015.
- http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia, diunduh pada 7 Juli 2015.

